



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (BKN)
UNIT KERJA : PUSAT PENGEMBANGAN SISTEM SELEKSI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SONI SULTANA**
2. Jabatan : **KEPALA PUSAT**
3. NHK : **637192**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 1.350.000.000**

1. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA KOTA BEKASI , WARISAN
Rp. 200.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 160 m2/225 m2 di KAB / KOTA KOTA
BEKASI , WARISAN Rp. 400.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/60 m2 di KAB / KOTA
SIDOARJO, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 160 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA
BANDUNG , HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 10 m2/10 m2 di KAB / KOTA KOTA
TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 279.500.000**

1. MOBIL, TOYOTA FORTUNER Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp.
200.000.000
2. MOTOR, VESPA PX 150 Tahun 2000, HASIL SENDIRI Rp.
2.000.000
3. MOTOR, KAWASAKI VERSYS 250 Tahun 2017, HASIL SENDIRI
Rp. 25.000.000
4. MOTOR, YAMAHA MIO Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp.
2.500.000
5. MOBIL, SUZUKI KARIMUN Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp.
50.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 105.000.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	1.845.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	3.579.500.000
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.579.500.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.